

SKRIPSI

**ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DENGAN
MENGUNAKAN *TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL* PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SINJAI**

DARMIATI



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2015

SKRIPSI

**ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DENGAN
MENGUNAKAN *TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL* PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SINJAI**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

DARMIATI

105730244911



JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2015

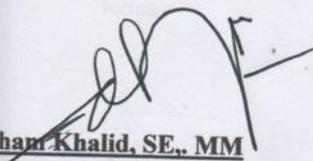
HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dengan
Menggunakan *Technology Acceptance Model* pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai
Nama : Darmiati
NIM : 105730244911
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

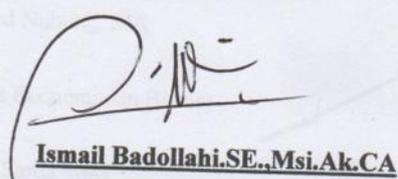
telah diseminarkan dan diperiksa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015

Disetujui Oleh

PEMBIMBING I


Adhham Khalid, SE., MM

PEMBIMBING 2

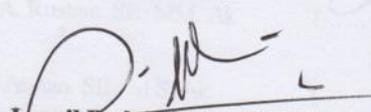

Ismail Badollahi, SE., Msi, Ak. CA

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis**


Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A
NBM : 497794

**Ketua Jurusan
Akuntansi**


Ismail Badollahi, SE., Msi, Ak. CA
NBM: 1073428

LEMBAR PENGESAHAN

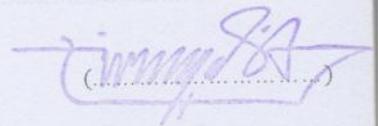
Skripsi ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : Tahun 1437 H/2015 M dan telah dipertahankan didepan tim penguji pada tanggal 22 Oktober 2015 sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Oktober 2015
Muharram 1437 H

Panitia ujian :

Pengawas Umum : Dr. Irwan Akib, M.Pd

(Rektor Unismuh Makassar)



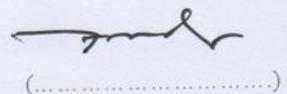
Ketua : Dr. H. Mahmud Nuhung, MA

(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)



Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM

(PDI Fakultas Ekonomi dan Bisnis)



Penguji

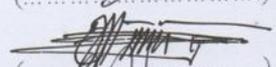
1. Drs. H. A. Rustam. SE, MM. Ak



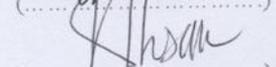
2. H. Andi Arman. SE., M.Si.Ak



3. Edi Jusriadi. SE.MM



4. Hj. Naidah. SE, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Darmiati

NIM : 105730244911

Jurusan/prodi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan `dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dengan Menggunakan *Technology Acceptance Model* Pada pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

(studi kasus pada BPKAD Kabupaten Sinjai)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan penelitiannya atau programming yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak lain.

Makassar, Desember 2015

Yang membuat pernyataan

Darmiati

Motto dan persembahan

Motto dan persembahan

Motto

“Jadilah seperti karang di lautan yang selalu kuat meskipun terus dihantam ombak dan lakukanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, karena hidup tidak abadi.

- ☒ Bersabar, berusaha, dan bersyukur
 - ✓ Bersabar dalam berusaha
 - ✓ Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
 - ✓ Dan bersyukur atas apa yang telah diperoleh

Persembahan

“aku persembahkan cinta dan sayangku kepada orang tuaku, saudaraku dan sahabat-sahabatku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”

ABSTRAK

Darmiati, 2015. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dengan Menggunakan *Technology Acceptance Model* Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. Pembimbing Idham Khalid dan Ismail Badollahi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi sistem informasi akuntansi keuangan daerah dengan menggunakan *technology acceptance model*. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner, data yang didapatkan dikembangkan dengan menilai dari berapa kuesioner yang diterima. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya *technology acceptance model* yang diterapkan pada pemerintah daerah kabupaten sinjai dinilai dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa proses penerimaan SIKD sepenuhnya dapat dijelaskan oleh *technology acceptance model (TAM)*.

Kata kunci : SIKD, *technology acceptance model (TAM)*, persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, sikap menggunakan, niat perilaku menggunakan dan penggunaan sesungguhnya.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'AalaikumWr.Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, sebagai ungkapan rasa syukur atas Rahmat dan Taufik-Nya yang di limpahkan kepada penulis, sehingga proposal dengan judul “*Analisis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dengan Menggunakan Technology Acceptance Model pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai*” dapat diselesaikan guna untuk memenuhi gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proposal yang saya buat masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis ingin menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya atas keterbatasan penulis, sebagai manusia yang tidak lupuk dari kesalahan dan kekhilafan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun pada semua yang membaca demi kesempurnaan proposal ini, khususnya pada dosen di masa yang akan datang untuk menjadi lebih baik.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi da Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Badollahi.SE.,Msi.Ak.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar atas kebijakan dalam penyusunan mata kuliah, sehingga penulis dapat mengikuti seluruh matakuliah sesuai konsentrasi penjurusan.
3. Bapak Ismail Badollahi.SE.,Msi.Ak.CA dan Bapak Idham Khalid,SE.,MM selaku dosen pembimbing skripsi atas waktu, perhatian, dan segala bimbingan serta arahnya selama penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar atas segala ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
5. Bapak dan Mama tercinta, terima kasih atas do'a, kasih sayang, pengorbanan, motivasi, bimbingan, nasehat, bekal ilmu hidup, dan segalanya, serta kakakku terima kasih atas dukungannya selama ini. Untuk keluargaku tercinta terima kasih selama ini telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil.
6. Teman-teman AK3 : Fajar, Wulan, Tuty, Risky,Dwi, Risna, Nurul, Iful,Ahmad serta teman-teman lain maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a dan dukungan kalian semua.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Makassar, Oktober 2015

Penyusun

DAFTAR TABEL

Tabel	Nama	Hal
Tabel 4.1	ikhtisar distribusi data dan pengembalian kuesioner	73
Tabel 4.2	karakteristik responden	64
Tabel 4.3	nama-nama Responden Kuesioner	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Nama	Hal
Gambar 4.1	struktur organisasi BPKAD	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, ketersediaan informasi yang cepat dan akurat menjadi sesuatu yang sangat penting, apalagi pada saat tingkat perubahan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan berlangsung demikian cepat. Demikian pula halnya dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan, ketersediaan data yang cepat dan akurat menjadi suatu keharusan khususnya di dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi dari suatu kebijakan.

Meningkatnya kebutuhan informasi mengakibatkan kebutuhan pengembangan sistem informasi juga meningkat. Adanya suatu pengembangan system akan membantu perusahaan untuk mempermudah pengelolaan data serta menyajikan sebuah informasi yang berkualitas. Untuk mencapai tujuannya, tiap instansi atau perusahaan memerlukan system yang bias mengatur semua proses bisnis yang terjadi, mulai dari proses mengumpulkan, mengirimkan, memasukan, mengolah dan menyimpan data-data tentang kejadian atau peristiwa ekonomi yang disebabkan oleh aktivitas atau operasi organisasi sehari-hari.

Pemerintah daerah sebagai perumus dan pelaksana kebijakan APBD berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksana pembangunan. Salah satu bentuk tanggungjawab tersebut yaitu menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk didalamnya informasi keuangan daerah (IKD). Pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyampaikan IKD kepada *stakeholder*. Hal ini dilakukan agar proses pembangunan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Untuk mewujudkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik tersebut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah direvisi dengan PP Nomor 65 Tahun 2010, telah diatur mengenai penyelenggaraan SIKD. Dalam PP tersebut diamanatkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing dengan menggunakan system informasi pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah kabupaten Sinjai merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menyelenggarakan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah disyaratkan bahwa kepada tiap-tiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

untuk menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) untuk keperluan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan PKD (Pengelolaan Keuangan Daerah). Oleh karena itu, pemerintah daerah kabupaten Sinjai diharapkan mampu untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

SIKD di pemerintah daerah kabupaten Sinjai diimplementasikan dengan menggunakan aplikasi SIMAKDA (Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah).SIMAKDA merupakan suatu system informasi yang telah dikembangkan untuk membantu pemerintah daerah (pemda) dalam pengelolaan keuangan.Dengan system informasi ini pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

Menurut Muhammad (2010), penerapan teknologi informasi dalam jajaran pemerintahan akan berpengaruh pada keseluruhan organisasi terutama pada sumber daya manusianya. Faktor sumber daya manusia sebagai pengguna dan pemakai sistem informasi sangat penting untuk diperhatikan dalam penerapan sistem baru, karena tingkat kesiapan penggunaan untuk menerima sistem baru mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sukses tidaknya pengembangan sistem tersebut (Kustono, 2000 dalam Tangke, 2004:10). Keberadaan sistem Informasi keuangan daerah (SIKD) di pemerintah daerah Sinjai belum tentu dirasakan manfaatnya oleh

pegawai/pemakai sistem, karena penggunaanya untuk pengolahan data akuntansi dan kegiatan lain kemungkinan tidak selalu mendatangkan kemudahan bagi pegawai. Bahkan sebaliknya, keberadaan teknologi informasi tersebut dapat mendatangkan kesulitan bagi pegawainya.

Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh atas penerimaan pegawai (pemakai) terhadap SIKD di pemerintah kabupaten Sinjai, maka diperlukan suatu model yang menggambarkan tingkat penerimaan terhadap teknologi yaitu *Technology Acceptance Model* (TAM). TAM merupakan suatu model penerimaan system teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai (Jogiyanto, 2007:111). Model penerimaan teknologi atau *tehnology acceptance model* (TAM) ini pertama kali diperkenalkan oleh Davis (1989). Tujuan utama TAM adalah untuk memberikan penjelasan tentang penentuan penerimaan computer secara umum dan memberikan penejlasan tentang perilaku/sikap pengguna dalam suatu populasi (Davis.1989:985).

Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian ini penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai penerimaan individu terhadap system teknologi informasi di pemerintahan daerah, khususnya di kabupaten Sinjai. Adapun penelitian ini berjudul “**Analisis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dengan Menggunakan *Technology Acceptance Model* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai**”.

B. Rumusan masalah

Penelitian ini ingin menganalisis sistem informasi keuangan daerah (SIKD) di pemerintah Kabupaten Sinjai dengan menggunakan model penerimaan teknologi (*technology acceptance model/TAM*) dan melihat hubungan antar variable menurut model tersebut. Sesuai model TAM, rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut”Bagaimana Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi keuangan daerah dengan menggunakan *Technology Acceptance Model* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dengan menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memberikan bukti empiris atau masukan bagi perkembangan sistem informasi khususnya sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan sistem yang dikembangkan berdasarkan model penerimaan teknologi (*Technology*

Acceptance Model), sehingga dapat memberikan pengetahuan mengenai model penerimaan teknologi untuk mengimplementasikan sistem informasi akuntansi keuangan daerah.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak pemerintahan untuk melihat peran sistem informasi terutama untuk system informasi keuangan daerah agar lebih relevan dan sesuai dengan sistem yang digunakan yang digunakan oleh pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu kumpulan yang diambil seseorang, badan atau lembaga yang pada umumnya memegang kekuasaan untuk mengatasi masalah-masalah atau tujuan tertentu, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Istilah ini dapat diterapkan oleh pemerintah, organisasi, dan kelompok sektor publik serta individu. Tujuan kebijakan adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat, untuk mengatur kehidupan masyarakat, dan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem informasi fungsional yang mendasari sistem informasi fungsional yang lainnya seperti sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi dan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem-sistem informasi lain membutuhkan data keuangan dari sistem informasi akuntansi.

1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Menurut Ahli

Kasmir (2004: 4) sistem informasi akuntansi adalah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan pengoperasian bisnis.

James A. Hall (2001 : 17) mendefinisikan sistem informasi akuntansi terdiri dari tiga subsistem utama : sistem pemrosesan transaksi yang mendukung operasi bisnis setiap hari dengan sejumlah dokumen untuk para pemakai seluruh organisasi, sistem pelaporan buku besar yang menghasilkan laporan keuangan tradisional, sistem pelaporan manajemen yang menyediakan manajemen dengan internal laporan keuangan dengan tujuan khusus dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

Mulyadi (2001). Sistem informasi akuntansi adalah catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Dari beberapa pengertian di atas, disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sistem yang memproses data dan transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan baik berupa catatan atau laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

2. Fungsi penting yang dibentuk SIA

Adapun fungsi penting sistem informasi akuntansi menurut Agus (2007 : 59) adalah :

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi.
- b. Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi.

3. Tujuan penyusunan Sistem Informasi Akuntansi

Tujuan utama penyusunan sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan menurut La Midjan (1995 : 12) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan informasi, yaitu informasi yang tepat guna, terpercaya dan tepat waktu, dengan kata lain sistem informasi akuntansi harus dengan cepat dan tepat dapat memberikan informasi yang diperlukan.
- b. Untuk meningkatkan sistem pengendalian internal, yaitu sistem pengendalian internal yang diperlukan agar dapat mengamankan kekayaan perusahaan. ini berarti bahwa sistem informasi akuntansi yang disusun harus juga mengandung kegiatan pengendalian internal.
- c. Harus dapat menekan biaya-biaya tata usaha, ini berhubungan dengan adanya biaya-biaya untuk menyusun sistem informasi akuntansi seefisien mungkin.

4. Manfaat sistem informasi akuntansi

Sutarman (2013), mengemukakan manfaat sistem informasi akuntansi :

- a. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada *value chain* secara efektif dan efisien.
- b. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan
- c. Meningkatkan efisiensi
- d. Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan
- e. Meningkatkan sharing knowledge

- f. menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan

5. Komponen Sistem Informasi Akuntansi

- a. Manusia adalah pelaku yang menjalankan sistem
- b. Transaksi merupakan objek dari sistem informasi akuntansi sebagai masukan, lalu diproses sehingga menghasilkan informasi
- c. Prosedur adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan transaksi atau kegiatan perusahaan.
- d. Dokumen yaitu berupa formulir yang digunakan sebagai sarana pencatatan pada saat transaksi
- e. Peralatan adalah suatu alat atau sarana yang digunakan dalam melakukan pencatatan pada sistem informasi yang bersangkutan.

B. Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik Negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. terdapat tuntunan yang lebih besar dari masyarakat untuk

dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Dalam pemerintahan sendiri, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi financial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Jika diamati secara lebih mendalam, akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan naik oleh kalangan akademisi maupun praktik sektor publik.

Organsisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada dimain public. Istilah “sektor

publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Akan tetapi, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Meskipun terdapat perbedaan di antara kedua sektor tersebut, yang perlu ditekankan bukan pada mencari perbedaan dan mempertentangkan antara sektor publik dengan sektor swasta. Fokus perhatian hendaknya lebih ditekankan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien.

2. Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu efektivitas yang memiliki tujuan (*purposive activity*). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal ini, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi.

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan *turbulence*. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur dan demografi.

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :

- 1) Pertumbuhan ekonomi
- 2) Tingkat inflasi
- 3) Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
- 4) Sektor produksi
- 5) Tenaga kerja
- 6) Arus modal dalam negeri

- 7) Cadangan devisa
- 8) Nilai tukar mata uang
- 9) Infrastruktur dan teknologi
- 10) Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi sektor informal

b. Faktor politik

Faktor politik yang mempengaruhi sector public antara lain :

- 1) Hubungan Negara dengan masyarakat
- 2) Legitimasi pemerintah
- 3) Tipe rezim yang berkuasa
- 4) Ideology Negara
- 5) Etik politik dan massa
- 6) Jaringan internasional
- 7) Kelembagaan

c. Faktor kultural

Faktor kultural yang mempengaruhi oerorganisasi sektor publik antara lain :

- 1) Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
- 2) Sistem nilai di masyarakat
- 3) Historis
- 4) Sosiologi kemasyarakatan
- 5) Karakteristik masyarakat
- 6) Tingkat pendidikan

d. Faktor demografi

Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :

- 1) Pertumbuhan penduduk
- 2) Struktur usia penduduk
- 3) Migrasi
- 4) Tingkat kesehatan

3. Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

a. Perbedaan Sektor Publik dengan Sektor Swasta

Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu :

1) Tujuan organisasi

Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Perbedaan yang menonjol terletak pada tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat semangat untuk memaksimalkan laba (*profit motive*), sedangkan pada sektor publik tujuan utama organisasi bukan untuk memaksimalkan laba tetapi pemberian pelayanan publik (*public service*), seperti: pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik (misalnya: penyediaan bahan kebutuhan pokok

masyarakat). Meskipun tujuan utama sector public adalah pemberian pelayanan publik, tidak berarti organisasi sektor publik sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat financial. Organisasi sector publik juga memiliki tujuan financial, akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofis, konseptual, dan operasionalnya dengan tujuan profitabilitas pada sektor swasta.

2) Sumber pembiayaan

Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan disebut sektor modal atau struktur pembiayaan. Struktur pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal bentuk, jenis dan tingkat resiko. Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, *charging for service*, laba perusahaan milik Negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah. Pada sektor swasta sumber pembiayaan dipisahkan menjadi sumber pembiayaan internal dan sumber pembiayaan eksternal. Sumber pembiayaan internal terdiri atas bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan (*retained earnings*) dan modal pemilik. Sedangkan sumber pembiayaan eksternal misalnya utang bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari publik.

3) Pola pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban manajemen sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Manajemen pada sektor swasta bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor publik manajemen bertanggungjawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat (*public funds*).

4) Struktur organisasi

Secara kelembagaan, organisasi sektor publik juga berbeda dengan sektor swasta. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Salah satu faktor utama yang membedakan sektor publik dengan sektor swasta adalah adanya pengaruh politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik.

5) Karakteristik anggaran

Jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan sebagai rahasia Negara. Sementara itu, anggaran pada sektor swasta

bersifat tertutup bagi publik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan.

6) *Stakeholder* yang dipengaruhi

1) Stakeholder sektor publik ada dua. Yaitu :

a) Stakeholder eksternal

1. Masyarakat pengguna jasa publik
2. Masyarakat pembayar pajak
3. Perusahaan dan organisasi social ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi
4. Bank sebagai kreditur pemerintah
5. Badan-badan internasional, seperti Bank dunia, IMF, ADB, PBB dsb.
6. Investor asing dan *Country Analyst*
7. Generasi yang akan datang

b) Stakeholder internal

1. Lembaga Negara
2. Kelompok politik (partai politik)
3. Manajer politik (gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD)
4. Pegawai pemerintah

2) Stakeholder sektor swasta

a) Stakeholder eksternal

1. Bank sebagai kreditur
2. Serikat buruh
3. Pemerintah
4. Pemasok
5. Distributor
6. Pelanggan dan masyarakat serikat dagang dan pasar modal

b) Stakeholder internal

1. Manajemen
2. Karyawan
3. Pemegang saham

7) sistem akuntansi yang digunakan

Perbedaan yang lain adalah sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi yang biasa digunakan pada sektor swasta adalah akuntansi berbasis akrual (*accrual accounting*). *Accrual accounting* adalah metode pencatatan dalam akuntansi dimana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan yang sesungguhnya sedangkan pada sektor publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas (*cash accounting*). *Cash accounting* merupakan metode pencatatan

dalam akuntansi dimana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan jumlah nominal yang diterima.

b. Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

Meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan, yaitu :

1. Kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu Negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya (*scarcity of resources*), sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif.
3. Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu : perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.
4. Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya: baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di

bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energy dan sebagainya.

5. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan

4. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sector public adalah :

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*)
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyedia informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi sektor

publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategic, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja

5. Perkembangan Akuntansi Sektor publik

Berbagai kritik mengenai peran organisasi sektor publik dalam pembangunan telah mengalami perubahan yang dramatis. Pada tahun 1950-an dan 1960-an sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan. Istilah “sektor publik” mulai dipakai pertama kali pada tahun 1952. Pada waktu itu, sektor publik sering dikaitkan sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan dan lembaga pelaksana pembangunan.

Pada tahun 1970-an, adanya kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan radikal menunjukkan kesan ingin mempertanyakan kembali peran sektor publik dalam pembangunan. Berbagai kritik muncul terhadap sektor publik yang keberadaannya dianggap tidak efisien dan jauh tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor swasta. Sektor publik dianggap lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan sektor swasta dan bahkan dianggap mengganggu pembangunan ekonomi dan sosial itu sendiri dengan alasan sector public sering dijadikan

sebagai sarang pemborosan dan inefisiensi ekonomi. Kedudukan sektor publik bertambah lemah karena orientasi pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan sektor swasta dan cenderung mengabaikan pembangunan sektor publik.

Pada tahun 1980-an reformasi sector public dilakukan di Negara-negara industry maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan yang ada. Berbagai perubahan dilakukan misalnya dengan mengadopsi pendekatan *New Public Management* (NPM) dan *reinventing government* di banyak Negara terutama Anglo-Saxon. Dengan adanya perubahan pada sector public tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sector public akuntansi sector public kemudian mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

6. Akuntabilitas Publik

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sector public dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas public oleh organisasi sector public (seperti: pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga Negara). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang

memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas public terdiri atas dua macam, yaitu :

a. Akuntabilitas vertical (*vertical accountability*)

Adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

b. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)

Adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas public yang diharuskan oleh organisasi sector public terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sector public, yaitu:

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan perantara lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana public.

b. Akuntabilitas proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan public yang cepat, responsive, dan murah biaya.

c. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah memperhatikan alternative program yang memberikan hasil yang optimal yang biayayang minimal.

d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPRDPRD dan masyarakat luas.

C. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah didefinisikan bahwa SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Selain itu informasi keuangan daerah (IKD) berdasarkan PP tersebut didefinisikan sebagai segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan SIKD. Penyelenggaraan SIKD di pemerintah telah diatur dalam PP Nomor 65 Tahun 2010. Dalam PP tersebut diamanatkan bahwa penyelenggaraan SIKD secara nasional adalah Menteri Keuangan, sedangkan pemerintah daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing dengan menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) melaksanakan keuangan sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan hal di atas, pemerintah daerah kabupaten Sinjai selaku penyelenggara SIKD di daerahnya menerapkan SIKD dengan menggunakan aplikasi SIMAKDA (Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah).

1. Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah (SIMAKDA) SIMAKDA adalah program aplikasi yang mampu memfasilitasi Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data-data terkait lainnya menjadi informasi yang dapat disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Pramono Hariadi (2010) sebagai selaku pengguna anggaran/barang wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana yang berada dibawah tanggung jawabnya. Mekanisme dan prosedur penyelegaraan akuntansi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah serta mengacu pada Standar Akuntansi dan Laporan Keuangan Pusat. Dalam pelaksanaannya, sistem akuntansi keuangan daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi laporan keuangan daerah. SIMAKDA merupakan software yang dibangun dengan mengadaptasi sistem perundang-undangan terbaru yang berlaku dalam keuangan pemerintah. Melalui perencanaan yang matang dalam pembuatan sistem,

aplikasi ini memudahkan pengguna dalam pengoperasiannya karena mudah dipahami. Selain itu, keamanan dan kerahasiaan data sangat terjaga melalui teknologi yang dikembangkan.

a. Modul-modul Simakda

Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah (SIMAKDA) memiliki fitur-fitur yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, yang didalamnya termuat modul-modul sebagai berikut :

- 1) Anggaran (form input RKA, form input DPA/DPPA, Perda tentang APBD, DAN perkara Tentang penjabaran APBD)
- 2) Kuasa BUD (Anggaran Kas Pemda, SPD, SP2D, Buku Bendaharawan)
- 3) Akutansi (Buku Jurnal, Buku Besar , Neraca Saldo)
- 4) Laporan Keuangan (LRA. Arus kas, Neraca)
- 5) Utilitas

b. Fungsi utama aplikasi simakda

Adapun fungsi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah (SIMAKDA) dalam penerapannya sebagai berikut :

1. Memperkuat basis manajemen otonomi daerah, khususnya dalam bidang pengelolaan informasi keuangan daerah

2. Mengembangkan sistem informasi (komputerisasi) akuntansi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
3. Menyediakan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dibutuhkan yang telah ditetapkan.
4. Menyediakan informasi keuangan yang handal dan akurat sehingga mampu mendukung proses perencanaan dan pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan.
5. Meningkatkan kemampuan aparatur daerah yang handal dan mampu memanfaatkan teknologi informasi.

D. Model penerimaan teknologi atau *technology acceptance model* (TAM)

Salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi adalah model penerimaan teknologi (*technology acceptance model*) (TAM) (Jogiyanto, 2007 : 111). Model penerimaan teknologi (TAM) merupakan suatu model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai.

Model TAM sebenarnya diadopsi dari model TRA (*Theory of Reasoned Action*) yaitu teori tindakan yang beralasan dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap suatu hal, akan menentukan

sikap dan perilaku orang tersebut. Reaksi dan persepsi pengguna teknologi informasi akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan terhadap teknologi tersebut. Salah satu factor yang dapat mempengaruhi adalah persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan sistem informasi sebagai salah satu tindakan yang beralasan dalam konteks pengguna teknologi, sehingga alasan seseorang dalam melihat manfaat dan kemudahan penggunaan sistem informasi menjadikan tindakan/perilaku orang tersebut sebagai tolok ukur dalam penerimaan sebuah sistem.

Kartika E.S. (2009) TAM telah banyak digunakan untuk memprediksi penerimaan *user* dan penggunaannya didasarkan pada persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Davis (1989) mengembangkan TAM dengan mengadaptasi dari TRA untuk memahami hubungan sebab akibat dengan mengaitkan variabel-variabel eksternal untuk intensitas penggunaan teknologi informasi dan penggunaan actual. TAM dikembangkan di bawah kontrak dengan IBM Kanada Ltd, pada pertengahan tahun 1980-an yang digunakan untuk mengevaluasi potensial pasar untuk berbagai macam aplikasi PC dalam area multimedia, *image processing*, dan *pen-based computing* sebagai pedoman bagi investor dalam pengembangan produk baru. Banyak peneliti mereplikasi TAM atau menggunakan instrument TAM (yang secara empiris mempunyai tingkat validitas tinggi) secara ekstensif untuk mencari *range* isu-isu dalam area penerimaan *user*. Para peneliti sistem informasi manajemen menggunakan

TAM dan TRA sebagai dasar teoritis untuk penelitian mereka terhadap factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan user tentang teknologi informasi tetapi dengan modifikasi TAM yang disesuaikan dengan kondisi penelitiannya.

Penelitian ini didasarkan pada TAM yang dikembangkan oleh Davis (1986) dalam Jogiyanto (2007:113) menjelaskan bahwa tingkat penerimaan pengguna teknologi informasi (*information technology acceptance*) ditentukan oleh 5 konstruk, yaitu :

- a. Persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha.
- b. Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya
- c. Sikap menggunakan teknologi (*attitude toward using technology*) didefinisikan sebagai persaaan positif atau negative dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang ditentukan.
- d. Niat perilaku menggunakan teknologi (*behavioral intention to use technology*) merupakan kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan suatu teknologi
- e. Penggunaan teknologi sesungguhnya (*actual technology use*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang menggunakan sistem.

1. Kelebihan dan kelemahan TAM

a. Kelebihan TAM

Technology Acceptance Model (TAM) mempunyai beberapa kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan-kelebihan TAM menurut Jogiyanto (2007:134-135) adalah sebagai berikut :

- 1) TAM merupakan model perilaku (*behavior*) yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan mengapa banyak sistem teknologi informasi gagal diterapkan karena pemakainya tidak mempunyai niat (*intention*) untuk menggunakannya.
- 2) TAM dibangun dengan dasar teori yang kuat.
- 3) TAM telah diuji dengan banyak penelitian dan hasilnya sebagian besar mendukung dan menyimpulkan bahwa TAM merupakan model yang baik.
- 4) Kelebihan TAM yang paling penting adalah model ini merupakan model yang parsimoni yaitu model yang paling sederhana tetapi valid.

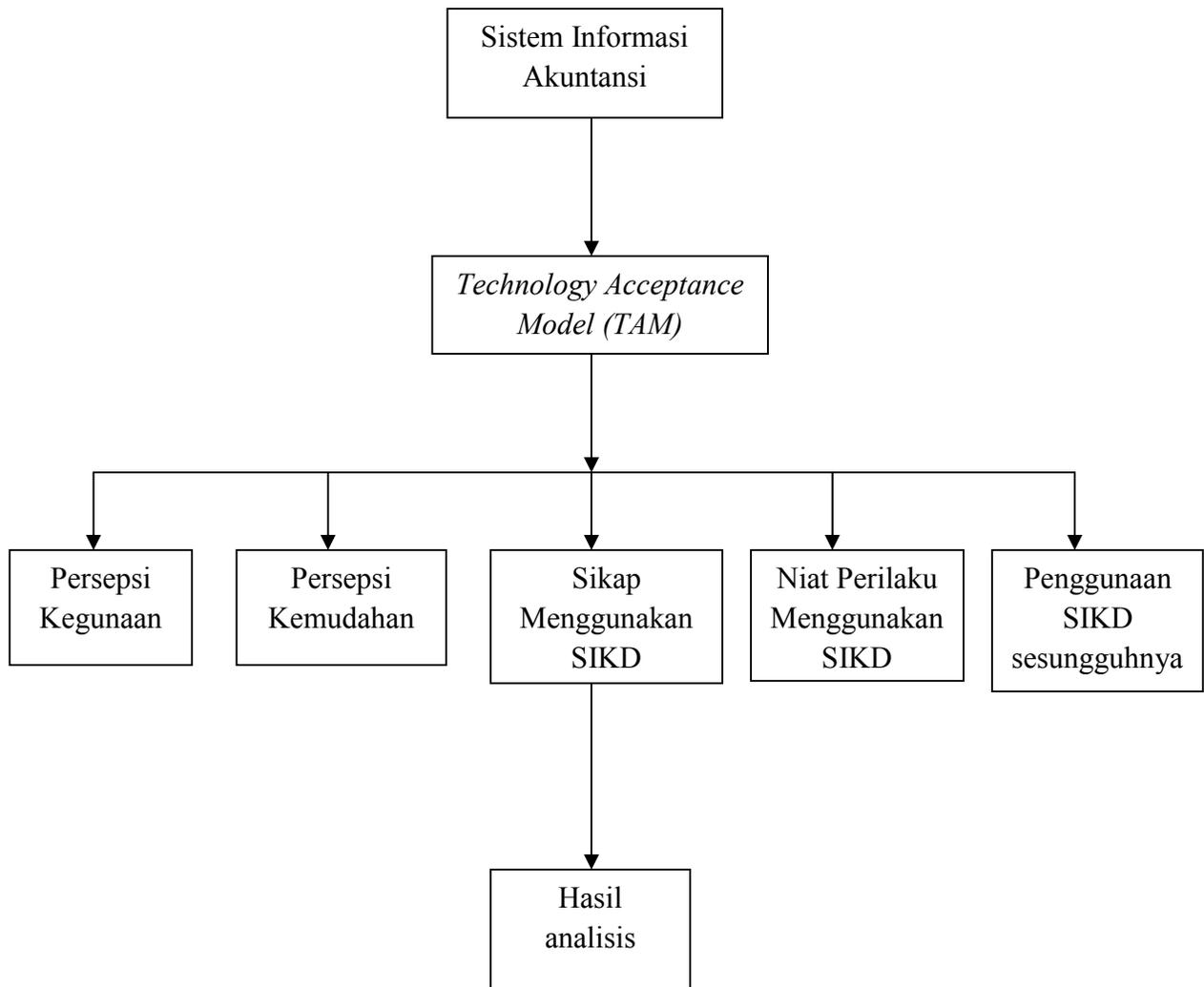
b. Kelemahan-kelemahan TAM

Di samping kelebihan-kelebihan TAM tersebut, TAM juga mempunyai beberapa kekurangan yaitu sebagai berikut Jogiyanto (2007:134-135) :

- 1) TAM hanya memberikan informasi atau hasil yang sangat umum saja tentang niat dan perilaku pemakaian sistem dalam menerima sistem teknologi informasi.
- 2) Perilaku pemakai sistem teknologi informasi di TAM tidak dikontrol dengan perilaku (*behavior control*) yang membatasi niat perilaku seseorang. Control perilaku seseorang ini menjelaskan mengapa seseorang mempunyai niat perilaku yang berbeda pada situasi yang sama.
- 3) Perilaku (*behavior*) yang diukur di TAM seharusnya adalah pemakai atau penggunaan teknologi sesungguhnya (*actual usage*).
- 4) TAM umumnya hanya menggunakan sistem informasi saja.
- 5) Beberapa penelitian TAM menggunakan subyek mahasiswa.
- 6) TAM kebanyakan menggunakan hanya subjek tunggal sejenis saja, misalnya hanya menggunakan sebuah organisasi saja sebuah departemen saja, atau sebuah kelompok mahasiswa tertentu saja.
- 7) Penelitian ini umumnya adalah penelitian *cross sectional* yang hanya melibatkan waktu satu periode saja tetapi dengan banyak sampel individu.

- 8) Umumnya dalam model penelitian TAM kurang dapat menjelaskan sepenuhnya antara hubungan (*causation*) variabel-variabel di dalam model.

E. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. Yang berlokasi di Jl. Jend. Ahmad Yani , Sinjai Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan dari bulan Mei sampai bulan Juni 2015.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari instansi mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan penulisan ini.

2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dokumen, literature, maupun hasil penelitian yang lain dan yang ada kaitannya dengan penelitian ini ke instansi terkait.

C. Metode Pengumpulan Data

Penggunaan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini lebih disesuaikan dengan analisis sistem informasi dan kemampuan penelitian sendiri tanpa maksud mengurangi prosedur yang berlaku. Metode yang digunakan pada teknik pengumpulan data ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan (library research)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan menelaah buku-buku literature, artikel dan karya-karya ilmiah lainnya yang dianggap memiliki relevansi dengan pembahasan proposal ini.

b. Penelitian lapangan (field research)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung kelapangan (lokasi) penelitian, dimana penulisan langsung melakukan penelitian pada objek yang diteliti.

D. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah penggunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dalam hal ini sistem informasi manajemen anggaran dan akuntansi keuangan daerah (SIMAKDA) di pemerintah daerah kabupaten sinjai. Sampel dalam penelitian ini adalah semua kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah) satuan pejabat pengguna anggaran, sekretaris daerah/kepala tata usaha selaku PKPA (pejabat kuasa pengguna anggaran). Dan kepala

SKPKD (satuan kerja pengelola keuangan daerah) selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) yang dala, hal ini adalah bagian keuangan dilingkungan pemerinah daerah kabupaten sinjai. Perrimbangan daam pemilihan sampel tersebut karena kepala SKPD, PKPA, dan kepalaSKPKD memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD) di mana mereka terlibat mulai dari merencanakan sampai pelaksanaan anggaran, yang memungkinkan member pengaruh terhadap sikap dalam penggunaan/penerimaan program aplikasi SIMAKDA sebagian bagi dari SIKD di pemerintah daerah tempa mereka bekerja.

E. Metode Analisis

Untuk mengkaji data yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mendeskripsika data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif untuk mengungkap fakta atau keadaan, fenomena dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya untuk menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi yang dapat diuraikan dalam bentuk teori.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Sinjai

Standar pelayanan publik merupakan suatu bentuk komitmen atau janji dari penyelenggara untuk memberikan pelayanan yang prima/berkualitas kepada masyarakat disamping itu sebagai tolok ukur dan pedoman baik bagi pemberi pelayanan maupun bagi penerima pelayanan. Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, psrtisipasi dan akuntabilitas

Berkaitan dengan hal tersebut, guna menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, maka pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dinilai memiliki standar pelayanan public sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan kaulitas di bidang pengelolaan keuangan dan aset.

Seiring berlakunya PP 41 tahun 2010 tentang struktur dan tata kerja organisasi pemerintahan, maka sejak tahun 2012 dibentuk badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sinjai. Pada awal berdirinya, badan

pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sinjai dipimpin oleh bapak ASLAN ABBAS, SH, MH selaku kepala badan. Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah terdapat 1 sekretariat dan 4 bidang yang terdiri dari bidang anggaran, bidang asset daerah, bidang perbendaharaan dan bidang akuntansi dan pelaporan

Pada tahun ini, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sinjai dipimpin oleh bapak Drs. H. MUHAMMAD IRVAN, M.SI.

Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah terdiri dari :

- a. Kepala badan
- b. Sekretariat
- c. Bidang anggaran
- d. Bidang perbendaharaan
- e. Bidang akuntansi dan pelaporan
- f. Bidang asset

B. Visi dan Misi BPKAD

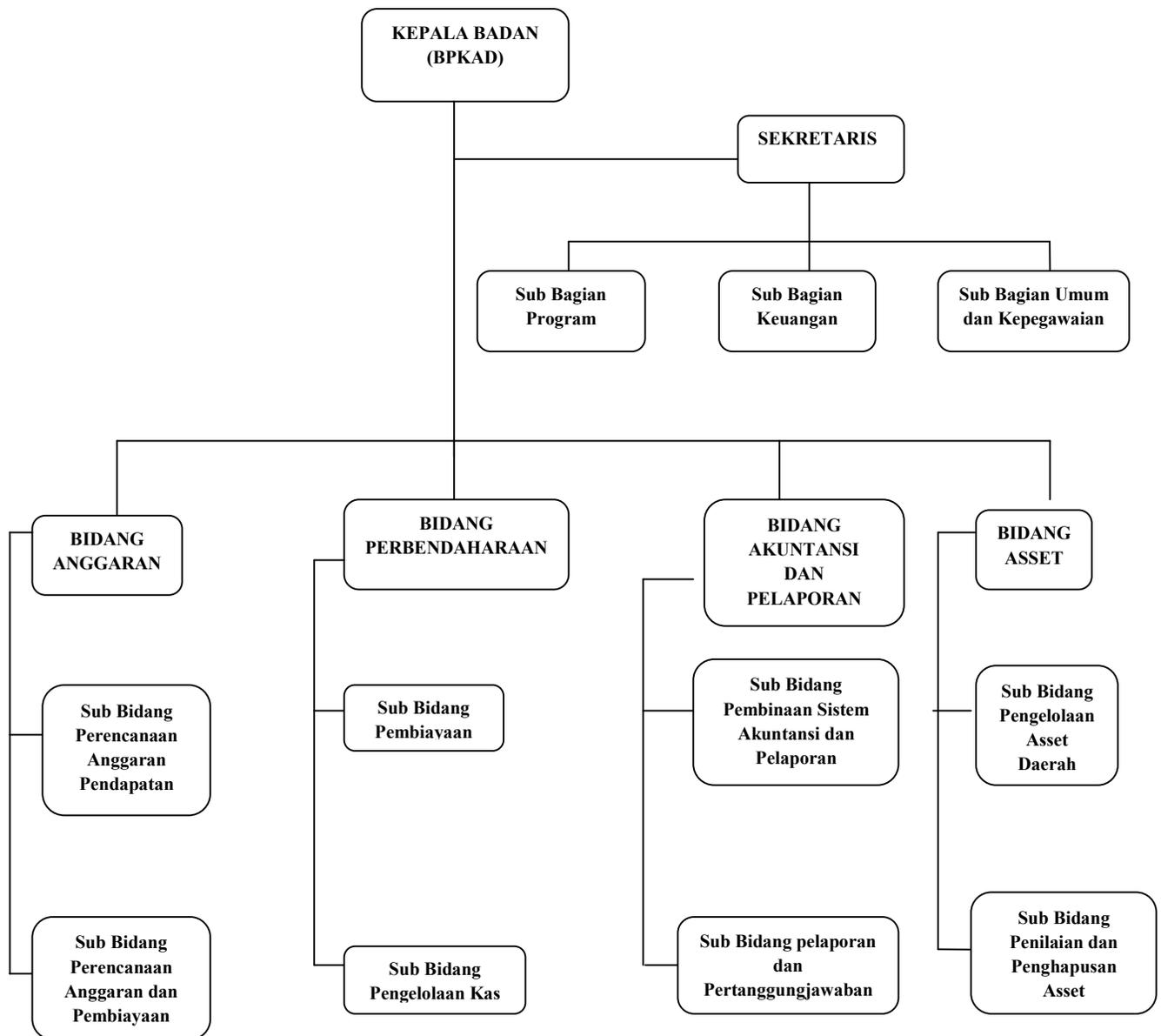
1. Visi

“Menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, akuntabel dan profesionalitas untuk mewujudkan kabupaten sinjai menuju WTP 2015”

2. Misi

- a. Meningkatkan profesionalisme aparatur lembaga di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- b. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah
- c. Menciptakan sistem manajemen pengelolaan keuangan aset daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas aset daerah.

C. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD

D. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kepala Badan

Tugas pokoknya adalah :

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan investasi aset daerah serta membina dan mengkoordinasi kegiatan manajemen untuk melaksanakan tugas dekosentrasi pada masing-masing bidang. Sedangkan fungsinya yaitu sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- b. Menyelenggarakan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- d. Pelaksanaan tata usaha badan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya

2. Sekretariat

Tugas pokoknya adalah :

- a. Menyelenggarakan urusan atat usaha yang meliputi urusan penyusunan program, tata usaha pengelolaan keuangan, umum kepegawaian dan perlengkapan

- b. Merencanakan kebijakan operasional disekretariat berdasarkan kebijakan umum kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan renstra badan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai pedoman kerja
- c. Melakukan koordinasi teknis dengan unit kerja terkait dengan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prsarana aparatur serta pembangunan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan
- d. Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di sekretariat agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan
- e. Mengarahkan disposisi dan perintah lisan/tulisan pimpinan kepada bidang yang bersangkutan agar dapat diselesaikan secara proporsional dan professional
- f. Memberikan usul dan saran kepada kepala badan pengelolan keuangan dan aset daerah selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analistis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan
- g. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan secretariat kepada kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah baik secara lisan maupun tertulis

Sekretariat terdiri dari :

a) Sub bagian program

1. Sub bagian program mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data, bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan koordinasi, fasilitas pembinaan teknis perencanaan dan menyusun rencana program dan kegiatan pendataan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Menyusun rencana program dan kegiatan evaluasi dan pelaporan
3. Melaksanakan penyusunan rencana strategi badan
4. Menghimpun dan menyusun bahan pelaporan pelaksanaan program kerja badan
5. Memeriksa dan mengoreksi serta mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya

b) Sub bagian keuangan

Tugas pokoknya adalah ;

1. Menyiapkan bahan pengendali, perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dan perlengkapan
2. Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan dan akuntansi yang meliputi pembukuan, perbendaharaan, verifikasi atas

permintaan pembayaran dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah

3. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan kepada bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran
4. Menindaklanjuti atas tuntutan ganti rugi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
5. Menghitung dan menyusun usulan anggaran tahunan beserta perubahannya dengan rumusan kebutuhan belanja badan

c) Sub bagian umum dan kepegawaian

Tugas pokoknya adalah :

1. Mengumpulkan data dan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, peningkatan kapasitas organisasi serta menyiapkan bahan-bahan laporan
2. Melaksanakan pengolahan administrasi persuratan, kearsipan dan urusan umum lainnya
3. Melaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan aset-aset daerah
4. Melaksanakan dan menyelesaikan urusan administrasi kepegawaian dilingkungan badan yang berkenan dengan hak-hak pegawai, termasuk penghargaan dan tanda kehormatan
5. Mengelola arsip dan dokumen pegawai

3. Bidang anggaran

Tugas pokoknya adalah :

- a. Memimpin dan merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan dan penyelenggaraan sebagian tugas kepala badan dalam lingkup penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan daerah
- b. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah, melakukan penagihan piutang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah
- c. Merencanakan program kerja bidang anggaran meliputi koordinasi dan pembinaan bidang anggaran pendapatan
- d. Merencanakan program kerja anggaran penanganan urusan pemerintah, penetapan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan dan perencanaan dan penganggaran pemerintahan
- e. Melaksanakan pengolahan rencana anggaran belanja langsung/belanja tidak langsung yang disusun masing-masing satuan kerja perangkat daerah
- f. Merumuskan bahan penyusunan konsep pedoman pelaksanaan anggaran belanja langsung/belanja tidak langsung

Bidang anggaran terdiri dari :

a) Sub bidang perencanaan anggaran pendapatan

Tugas pokoknya adalah :

1. Merumuskan program kerja, melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan APBD dan bina anggaran daerah
2. Menyusun rencana kerja dan kegiatan sub bidang penyusunan APBD dan bina anggaran daerah berdasarkan tugas dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
3. Mengkoordinasikan SKPD dalam penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
4. Menyimpan anggaran kas untuk pemerintah daerah
5. Memeriksa persiapan pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)

b) Sub bidang perencanaan anggaran dan pembiayaan

Tugas pokoknya adalah :

1. Menyusun rencana kerja dan kegiatan, melaksanakan penatausahaan, pengendalian dan pelaporan dan perimbangan dan pembiayaan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan pinjaman, obligasi daerah

2. Merumuskan dan menyusun rencana kerja dan kegiatan sub bidang perencanaan anggaran dan pembiayaan berdasarkan tugas dan renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
 3. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
4. Bidang perbendaharaan
- Tugas pokoknya adalah :
- a. Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan dan penyelenggaraan sebagian tugas kepala badan dalam lingkup penatausahaan Negara.
 - b. Menyusun pedoman teknis dalam melaksanakan pengelolaan dan pengendalian dibidang perbendaharaan
 - c. Melakukan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan terhadap SKPD.
 - d. Melaksanakan pengendalian penerimaan, penyimpangan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah
 - e. Melaksanakan pemungutan/pemotongan piutang dan utang daerah.
 - f. Melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran serta pemungutan/pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait

- g. Penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian di bidang perbendaharaan

Bidang perbendaharaan terdiri dari :

- a) Sub bidang pembiayaan

Tugas pokoknya adalah :

1. Merumuskan dan menyusun program kerja dan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan dibidang pembiayaan
2. Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang perbendaharaan dan sub bidang pembiayaan
3. Menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

- b) Sub bidang pengelolaan kas

Tugas pokoknya adalah :

1. Merumuskan dan menyusun program kerja dan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan kas
2. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait serta melakukan pembinaan terhadap SKPD
3. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

4. Melaksanakan proses penerbitan dan daftar pengantar SP2D belanja SKPD
5. Melaksanakan kajian dan pengembangan terhadap sistem tata usaha keuangan daerah.

5. Bidang akuntansi dan pelaporan

Tugas pokoknya adalah :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran.
- b. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang pembukuan dan pelaporan
- c. Merencanakan program kerja bidang anggaran meliputi koordinasi dan pembinaan bidang pembukuan dan pelaporan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap program kerja dan kegiatan sub bidang akuntansi dan informasi keuangan daerah dan sub bidang pelaporan

- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan pembinaan bidang pembukuan dan pelaporan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut.

Sub bidang akuntansi dan pelaporan terdiri dari :

- a) Sub bidang pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan

Tugas pokoknya adalah :

1. Merumuskan dan menyusun rencana kerja, menyusun kebijakan teknis bidang akuntansi pengelolaan keuangan daerah serta melaksanakan monitoring terhadap laporan keuangan.
2. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja bidang sistem akuntansi keuangan daerah.
3. Menyiapkan bahan perumusan program dan kebijakan teknis dibidang akuntansi dan penatausahaan keuangan daerah
4. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran sub bidang akuntansi dan informasi keuangan daerah berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bidang akuntansi dan informasi keuangan daerah kepada kepala badan pengelolaan keuangan daerah.

b) Sub bidang pelaporan dan pertanggungjawaban

Tugas pokoknya adalah :

1. Mermuskan dan menyusun rencana kerja, laporan keuangan daerah, melaksanakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran, menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah serta melaporkan dan mengevaluasi realisasi anggaran kabupaten.
2. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja sub bidang pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. Menyusun laporan keuangan daerah dan rancanagn peraturan daerah etantang pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah.
4. Melaksanakan evaluasi terhadap realisasi APBD
5. Menyusun laporan realisasi anggaran kabupaten
6. Melakukan pencatatan penelitian terhadap bukti kas/bank mengenai penerimaan daerah.

6. Bidang asset

Tugas pokoknya adalah :

- a. Menyiapkan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaa, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaa, pengawasan dan pengendalian serta inventarisasi.

- b. Mengkordinasi, emlaksanankan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang asset
- c. Menyusun dan menyiapkan rancangan pedoman peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan milik daerah.
- d. Menyusun mekanisme penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku
- e. Memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada pengguna barang kuasa pengguna barang melalui kepala badan terkait pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah
- f. Menghimpun, menyimpan dan mengamankan seluruh bukti asli kepemilikan barang milik daerah
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggraan pengelolaan barang milik daerah

Bidang asset terdiri dari :

- a) Bidang pengelolaan aset daerah

Tugas pokoknya adalah :

1. Merumuskan dan menyusun rencana kerja, melaksanakan rekapitulasi dan pelaporan barang milik daerah serta menyusun pedoman standar kebutuhan barang daerah dan ptunjuk teknis pengelolaan aset

2. Menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan rencana kebutuhan keuangan daerah terkait dengan pengelolaan aset
3. Menghimpun dan merekapitulasi laporan barang pengguna semester dan tahunan menjadi laporan barang milik daerah
4. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran sub bidang pengelolaan aset berdasarkan pencapaian kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bidang pengelolaan aset kepada kepala bidang aset secara periodic sebagai bahan pertanggungjawaban

b) Sub bidang penilaian dan penghapusan aset

Tugas pokoknya adalah :

1. Merumuskan dan menyusun rencana kerja, melaksanakan penilaian, menyusun laporan mutasi serta melaksanakan penatausahaan barang milik daerah
2. Menyusun rencana kerja, dan kinerja tahunan sub bidang penilaian dan penghapusan aset
3. Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan barang milik daerah guna pengkajian penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian status kepemilikan daerah

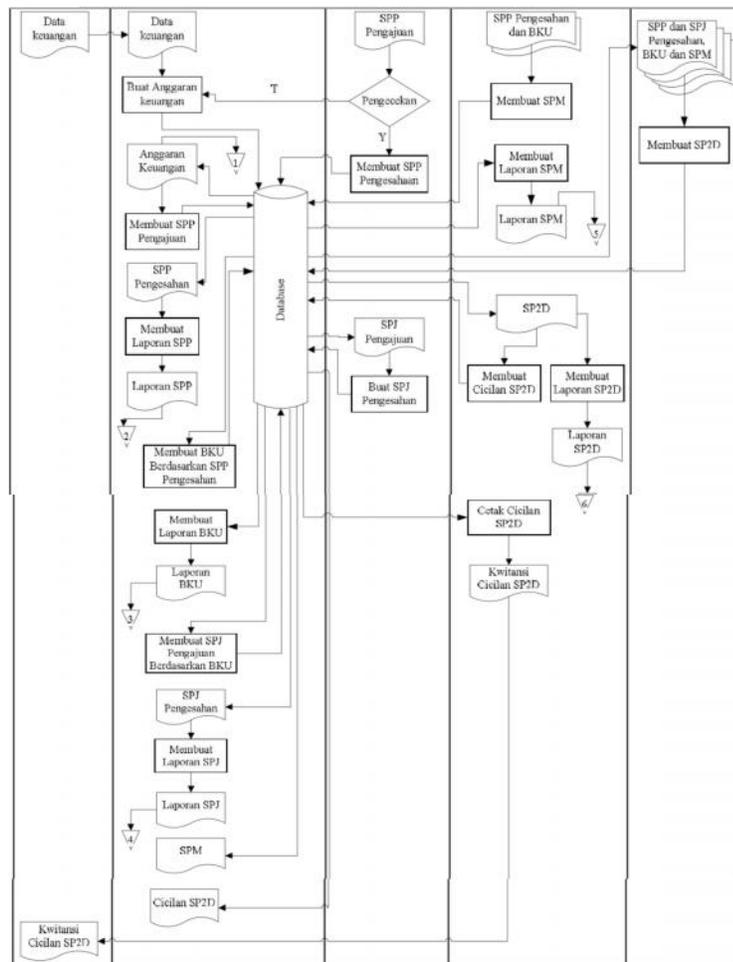
4. Membuat laporan pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan barang milik daerah serta laporan-laporan yang menyangkut barang milik daerah
5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan data dan informasi yang diterima.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur dan *Flowchart* Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai

Untuk menggambarkan informasi keuangan dalam suatu perusahaan diperlukan adanya suatu sistem informasi yang akan memberikan kemudahan kepada SKPD ataupun karyawan dalam suatu perusahaan untuk menilai informasi keuangan dan juga untuk menilai tingkat kinerja suatu sistem tersebut. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai mempunyai sistem informasi keuangan yang dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



Gambar 4.1 Flowchart sistem informasi keuangan daerah Kabupaten Sinjai

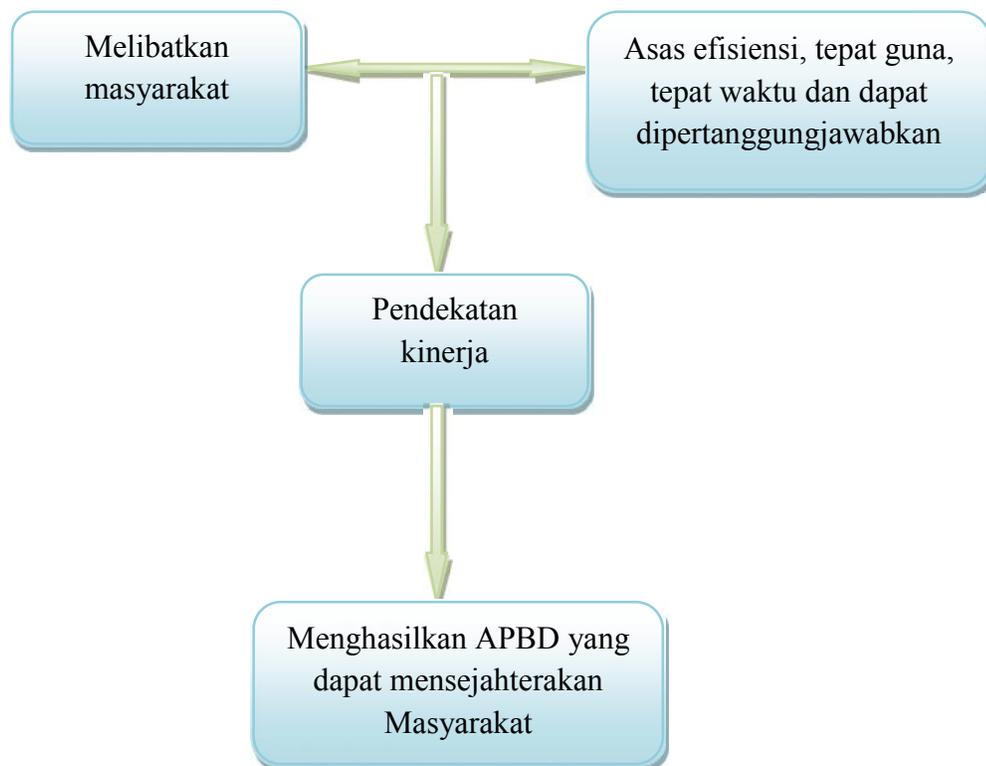
Untuk menggambarkan *flowchart* sistem informasi keuangan daerah (SIKD) yang berbasis komputerisasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai memberikan gambaran sistem informasi keuangan dengan keterangan sebagai berikut :

1. Pihak administrasi memberikan data keuangan kepada BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu).
2. Kemudian dari data keuangan dibuat anggaran keuangan oleh BPP.

3. BPP membuat SPP (Surat Permohonan Pengajuan) dari anggaran keuangan.
4. Pihak verifikator mengecek SPP pengajuan dan mengesahkannya, apabila anggaran disetujui langsung SPP disahkan tetapi apabila anggaran tidak disetujui, SPP dikembalikan kepada BPP.
5. Kemudian SPP yang sudah disahkan diberikan kembali kepada BPP.
6. Selanjutnya, dari SPP yang telah disahkan, BPP membuat BKU (Buku Kas Umum), kemudian BKU tersebut dibuat laporannya dan diarsipkan.
7. BPP membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) berdasarkan data BKU.
8. SPJ diberikan ke pihak verifikator untuk disahkan, kemudian SPJ yang sudah disahkan diberikan kembali kepada BPP.
9. Oleh BPP dibuat juga laporan SPJ yang sudah disahkan dan dikirimkan juga kepada pihak BP.
10. Selanjutnya SPP dan BKU yang sudah disahkan diberikan kepada pihak BP untuk dibuat SPM (Surat Perintah Membayar) dan diberikan kepada pihak BPP.
11. SPM dibuat laporannya untuk diarsipkan oleh pihak BP.
12. Kemudian pihak BP memberikan SPP valid, BKU, SPJ valid dan SPM kepada pihak Biro.
13. Selanjutnya pihak biro membuatkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang kemudian dikirimkan kepada BP.
14. Pihak BP membuatkan laporan SP2D untuk diarsipkan.

Bagan 4.1 diatas menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan untuk menilai tingkat kinerja sebuah perusahaan yang mana para SKPD yang telah dibentuk oleh kepala badan memulai dengan penyusunan APBD dan membuat dokumen tentang pelaksanaan APBD dan penatausahaan pengeluaran yang akan diberikan oleh bagian akuntansi dan pelaporan dan akan melaksanakan penatausahaan penerimaan tentang penyusunan APBD.

Diagram alur penyusunan APBD



Berdasarkan diagram alur penyusunan APBD di atas menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi sangat mendukung untuk meningkatkan kinerja keuangan karena dapat melibatkan seluruh masyarakat untuk bekerja sama dalam mengelola APBD ataupun keuangan daerah dengan berdasar pada asas efisiensi, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melalui pendekatan kinerja untuk dapat mensejahterakan masyarakat dalam mengelola APBD atau keuangan daerah.

C. Deskripsi Data

Pemilihan model Sistem Informasi Akuntansi keuangan daerah yang berorientasi pada upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sinjai merupakan salah satu perkembangan sistem informasi akuntansi yang bergerak dalam bidang keuangan daerah untuk menilai kedepannya kinerja pemerintah tersebut dalam mengelola keuangannya.

Pengukuran dan penilaian sistem informasi akuntansi dilaksanakan sesuai dengan penetapan kinerja pada pemerintah daerah kabupaten sinjai untuk menilai sejauh mana tingkat penerimaan dan penggunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang digunakan untuk mengelola informasi keuangannya.

Untuk menilai tingkat penerimaan sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah kabupaten sinjai maka peneliti memperoleh data yang berupa data primer dalam bentuk kuesioner. Adapun kuesioner yang disebar yaitu Kuesioner yang berisi 23 item pertanyaan disebar kepada 84 responden diantaranya yang menjabat sebagai Kepala, Sekretaris dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat melalui 42 Kantor yang terdiri dari 16 Dinas dan 8 Badan serta lainnya yaitu Inspektorat Daerah. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada responden. Penyebaran kuesioner dimulai pada 1 agustus sampai dengan 10 agustus 2015.

Jumlah kuesioner yang dikembalikan sebanyak 72 eksemplar atau 85% dari jumlah kuesioner yang disebar yaitu sebanyak 84 keusioner. Jumlah kuesioner dengan data yang dapat diolah adalah sebanyak 70 eksemplar atau 80%, dimana 2 data kuesioner tidak dapat diolah karena jawaban tidak lengkap dan rusak. Dengan pertimbangan keterbatasan waktu dan jumlah kuesioner yang kembali tersebut sudah dianggap mencukupi atau memadai untuk di analisis. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 4.1 (terlampir).

Tabel 4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik		Frekuensi	Persentase (100%)
Jenis kelamin	Pria	50	35
	Wanita	20	14
Umur	Dibawah 21 tahun	0	0
	21 s.d 30 tahun	4	2,8
	31 s.d 40 tahun	12	8,4
	41 s.d 50 tahun	22	15,4
	Di atas 51 tahun	32	22,4
Pendidikan terakhir	SLTA	2	1,4
	Diploma	12	8,4
	Sarjana (S1)	35	24,5
	Magister (S2)	18	12,6
	Doktor (S3)	3	2,
	Lainnya	0	0
Lama menggunakan SIAKD	Dibawah 5 tahun	6	4,2
	6 s.d 10 tahun	64	44,8
	11 s.d 20 tahun	0	0
	Diatas 21 tahun	0	0

Sumber : Data yang diolah, 2015

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa responden didominasi oleh pria sebanyak 50 orang atau 42 %, sedangkan jumlah responden perempuan sebanyak 20 orang atau 16,8%. Selanjutnya dilihat dari factor umur sebagian besar responden berusia di 51 tahun sebanyak 32 responden atau 28,88%, responden yang berumur antara 41 sampai dengan 50 tahun sebanyak 22 responden atau 18,48%, dan responden yang berumur antara 31 sampai dengan 40 tahun sebanyak 12 responden atau 10,04 %.

Berdasarkan jenjang pendidikan yakni SLTA sebanyak 2 responden atau 1,68%, sarjana (S1) sebanyak 35 responden atau 29,4% dan master (S2) sebanyak 18 responden atau 15,12%, sedangkan responden yang jenjang doctor sebanyak 3 responden atau 2,52%.

Selanjutnya responden yang menggunakan SIAKD dibawah 5 tahun sebanyak 6 responden atau 5,04%, sedangkan responden yang menggunakan SIAKD antara 6 sampai dengan 10 tahun lamanya sebanyak 64 responden atau 53,76%.

D. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai

Penggunaan Sistem informasi akuntansi keuangan daerah pada pemerintah daerah kabupaten sinjai dapat dikatakan efektif, karena sistem informasi yang digunakan untuk mengolah keuangan daerah sangat menunjang kinerja pemerintah terbukti dengan adanya data yang diperoleh yaitu data primer berupa kuesioner yang disebar kepada seluruh SKPD seluruh kabupaten sinjai.

Selain data kuesioner diatas, peneliti juga mendapatkan data berupa wawancara dari salah satu karyawan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah kabupaten sinjai yaitu bapak BAHRI, S.Sos, M.AP selaku kepala bidang penilaian dan penghapusan aset yang menyatakan bahwa “ dengan adanya sistem informasi keuangan daerah yang berlaku di Kabupaten

sinjai khususnya di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah ini, dapat mempermudah para karyawan ataupun SKPD yang ada dikabupaten sinjai untuk menggunakan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan, kemampuan mereka untuk mengaplikasikan sistem informasi tersebut khususnya dalam mengelola keuangan di Kabupaten Sinjai in. selain itu, dengan banyaknya sistem informasi yang berkembang saat ini kita mengharapkan agar sistem informasi tersebut dapat meningkatkan kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai”.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem informasi akuntansi keuangan daerah dengan menggunakan TAM (*technology Acceptance Model*) pada kantor pemerintah daerah kabupaten sinjai.
2. Variabel atau konstruk yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lima konstruk utama pada TAM yakni, persepsi *kemudahan* (*perceived ease of use*), persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), sikap menggunakan SIKD (*attitude toward using*), niat perilaku menggunakan SIKD (*behavioral intention of use*) dan penggunaan SIKD sesungguhnya (*actual use*).
3. Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, yang menunjukkan bahwa responden setuju untuk mengelola keuangan daerah dengan model TAM karena banyaknya responden yang setuju dengan persepsi kegunaan, kemudahan, niat menggunakan sistem tersebut karena dapat memberikan kemudahan untuk mengoperasikan sistem informasi untuk mengelola keuangan daerah, mudah untuk terampil dalam menggunakan aplikasi sistem dengan model TAM tersebut.

4. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya aplikasi sistem informasi akuntansi yang digunakan pada pemerintah daerah kabupaten sinjai khususnya TAM dapat meningkatkan kinerja pada pemerintah daerah kabupaten sinjai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dengan menggunakan Technology Acceptance Model akan lebih bermanfaat bagi perusahaan untuk menilai tingkat kinerja keuangan, maka peneliti menyarankan kepada perusahaan untuk menggunakan model TAM untuk menunjukkan bagaimana aplikasi tersebut memberi kemudahan, kegunaan bagi penggunanya untuk meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi perusahaan.
2. Seharusnya perusahaan harus lebih konsisten dalam memilih dan menerapkan sistem informasi khususnya model TAM yang akan digunakan untuk mengelola keuangan daerah untuk membantu meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah.
3. Ruang lingkup penelitian untuk penelitian selanjutnya dapat diperluas lagi sehingga tingkat generalisasi ke populasinya bisa lebih luas.

4. Penelitian yang akan datang mengenai aspek yang sama sebaiknya melakukan pre-test untuk memperkecil kemungkinan gambaran yang lebih jelas tentang keadaan yang sesungguhnya.

C. Keterbatasan penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut sebagai berikut :

1. Penelitian ini memiliki jumlah sampel 74 responden yang sedikit dan terbatas untuk populasi pengguna SIMAKDA dipemerintah daerah kabupaten sinjai
2. Ruang lingkup penelitian hanya diwilayah kabiupaten sinjai, sehingga kurang bias mewakili persepsi atau tingkat pemahaman terhadap penerimaan sistem informasi yang diadobsi diwilayah lain.
3. Keterbatasan yang melekat dalam metode survey yaitu peneliti tidak bisa mengontrol jawaban responden apabila responden tidak jujur dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dan tidak lengkapnya pengisian kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, (2007 : 29) *analisis sistem informasi akuntansi penjualan terhadap penurunan tingkat piutang tak tertagih*: Univeritas Widyatama.
- Davis, F.D .. *Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, ad User Acceptance Of Information Technology*. *MIS Querterly* , (online), vol 13, No 3,pp.319340,(<http://links.jstor.org/sici?sici=0276783%28198909%2913%3C319%3PUPEOU%3E .0.CO.%3B2-E>, (di akses 14 februari 2014)
- Hariadi, pramono.,Yanuar E. Ristanto & Icuk Rangga Bawono (2010), *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat : Jakarta.
- James A. Hall (2001 : 17)*Definisi sistem informasi akuntansi*. <http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-sistem-informasi-akuntansi/>(diakses 31 januari 2015)
- Jogiyanto, (2007 : 111) *tingkat penerimaan technology acceptance model*. [technology-acceptance-model-tam /](http://ilmuakuntansi.web.id/technology-acceptance-model-tam/) (diakses 16 februari 2015)
- Kartika, E.S. 2009.*Analisis Proses Penerimaan Sistem Informasi dengan Menggunakan Technology Acceptance Model PadaKaryawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Di Kota Semarang*.Semarang: Program Studi Magister Akuntansi. Universitas Diponegoro.
- Kasmir (2004: 4) *analisis sistem informasi akuntansi penjualan terhadap penurunan tingkat piutang tak tertagih*: Univeritas Widyatama.

La Midjan (1995 : 12) *analisis sistem informasi akuntansi penjualan terhadap penurunan tingkat piutang tak tertagih*: Univeritas Widyatama

Mardiasmo, 2009, *akuntansi sektor public*, Andi : Yogyakarta.

Mulyadi (2001) *analisis sistem informasi akuntansi penjualan terhadap penurunan tingkat piutang tak tertagih*: Univeritas Widyatama.

Sutarman (2013). *Manfaat dan Komponen Sistem Informasi Akuntansi*. http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi_akuntansi (diakses 20 januari 2015).

LAMPIRAN

Tabel 4.1 Ikhtisar Distribusi dan Pengembalian Kuesioner

No	Responden	Kuesioner yang disebar/dikirm	Kuesioner yang kembali	Kuesioner yang tidak dapat digunakan	Kuesioner yang dapat diolah
1	Sekretariat DPRD	2	2	0	2
2	Sekretariat Daerah	4	3	0	3
3	Secretariat dewan pengurus KORPRI	2	2	0	2
4	Inspektorat	20	12	2	10
5	Dinas-Dinas				
	a. Dinas pekerjaan umum	2	2	0	2
	b. Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan	2	2	0	2
	c. Dinas Perhubungan	2	2	0	2
	d. dinas kesehatan	2	2	0	2
	e. dinas pendidikan, pemuda dan olahraga	2	2	0	2
	f. dinas tenaga kerja, social dan transmigrasi	2	2	0	2
	g. dinas kependudukan dan catatan sipil	2	2	0	2
	h. dinas pertanian, tanaman	2	2	0	2

	pangan dan hortikultura				
	i. dinas perkebunan dan kehutanan	2	2	0	2
	j. dinas kelautan dan perikanan	2	2	0	2
	k. dinas peternakan dan kesehatan hewan	2	2	0	2
	l. dinas perindustrian dan perdagangan	2	2	0	2
	m. dinas energy dan sumber daya mineral	2	2	0	2
	n. dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah	2	2	0	2
	o. dinas pendapatan daerah	2	1	0	1
	p. dinas komunikasi, informatika, kebudayaan dan kepariwisataan	2	2	0	2
5	Badan-badan				
	a. badan penganggulangan bencana daerah	2	2	0	2
	b. badan				

	pemberdaayaan masyarakat	2	2	0	2
	c. badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	2	2	0	2
	d. badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan	2	2	0	2
	e. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah	10	8	0	8
	f. badan penanaman modal dan pelayanan perzinan	2	2	0	2
	g. badan perencanaan pembangunan, peneliti dan pengembangan daerah	2	2	0	2
	h. badan kepegawaian daerah	2	2	0	2
	JUMLAH	84	72	2	70
N Sampel = 70					
Responden = $(70 / 84) \times 100\% = 83\%$					

Sumber : Data yang diolah, 2015

KUISIONER

Petunjuk Pengisian

Daftar pertanyaan berikut ini terdiri dari isian dan tipe pilihan. Pada tipe isian, mohon Bapak/Ibu mencantumkan identitas diri dari tempat yang telah disediakan. Pada tipe pilihan, mohon diberi lingkaran pada nomor jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling tepat. persepsi kemudahan (*Perceived Ease of Use*), Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*), Sikap Menggunakan SIKD (*Attitude Toward Using*), Niat Perilaku Menggunakan SIKD (*Behavioral Intention To Use*), Penggunaan SIKD Sesungguhnya (*Actual Use*) terhadap kepuasan pengguna akhir sistem informasi akuntansi di tempat Bapak/Ibu bekerja dengan melingkari nomor pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling tepat.

A. Pertanyaan Umum

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Pendidikan terakhir/jurusan :
Posisi (jabatan pekerjaan) :
Masa kerja :
Lama menggunakan SIKD :

B. Pertanyaan Khusus

1. Pertanyaan tertutup

Berikut ini akan dilampirkan pertanyaan mengenai persepsi kemudahan (*Perceived Ease of Use*), Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*), Sikap Menggunakan SIKD (*Attitude Toward Using*), Niat Perilaku Menggunakan SIKD (*Behavioral Intention To Use*), Penggunaan SIKD Sesungguhnya (*Actual Use*) terhadap kepuasan pengguna akhir sistem informasi akuntansi di tempat Bapak/Ibu bekerja dengan melingkari nomor pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling tepat.

2. Keterangan

Sangat Tidak Setuju	STS
Tidak Setuju	TS
Netral	N
Setuju	S
Sangat Setuju	SS

a. Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease of Use*)

Daftar pertanyaan berikut, bertujuan untuk mengungkapkan persepsi bapak/ibu mengenai kemudahan penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) pada instansi tempat bapak/ibu bekerja.

- Bagaimana persepsi bapak/ibu tentang kemudahan penggunaan SIKD di tempat bapak/ibu bekerja sesuai dengan kelompok pertanyaan di bawah ini.

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Belajar untuk mengoperasikan SIKD adalah mudah bagi saya					
2	Menurut saya, mudah untuk melakukan apa saja dengan menggunakan SIKD					
3	Berinteraksi dengan SIKD sangat jelas dan mudah dimengerti					
4	Mudah untuk terampil dalam menggunakan SIKD					
5	Menurut saya, sangat fleksibel dalam berinteraksi dengan SIKD					
6	Menurut saya, SIKD mudah digunakan					

b. Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*)

Daftar pertanyaan berikut, bertujuan untuk mengungkapkan persepsi bapak/ibu mengenai kegunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) pada instansi tempat bapak/ibu bekerja.

- Bagaimana persepsi bapak/ibu tentang kegunaan SIKD di tempat bapak/ibu bekerja sesuai dengan kelompok pertanyaan di bawah ini.

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Dengan menggunakan SIKD, mempercepat penyelesaian tugas-tugas saya.					
2	Dengan menggunakan SIKD, kinerja saya akan meningkat.					

3	Dengan menggunakan SIKD, produktivitas saya meningkat.					
4	Dengan menggunakan SIKD, efektivitas saya dalam bekerja meningkat.					
5	Dengan menggunakan SIKD, lebih memudahkan saya dalam menjalankan pekerjaan saya.					
6	Menurut saya, SIKD berguna dalam pekerjaan saya.					

c. Sikap Menggunakan SIKD (*Attitude Toward Using*)

Daftar pertanyaan berikut, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada bapak/ibu dalam mengungkapkan bagaimana sikap bapak/ibu terhadap penggunaan SIKD di tempat bapak/ibu bekerja.

- Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap terhadap menggunakan SIKD dalam mengelola aktivitas instansi sesuai dengan kelompok pertanyaan di bawah ini.

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya merasa senang berinteraksi dengan SIKD.					
2	Penggunaan SIKD menyediakan banyak kenikmatan dan kemudahan bagi saya.					
3	Saya menikmati penggunaan SIKD dalam pekerjaan saya.					
4	Menggunakan SIKD membosankan bagi saya.					

d. Niat Perilaku Menggunakan SIKD (*Behavioral Intention To Use*)

Daftar pertanyaan berikut, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada bapak/ibu dalam mengungkapkan bagaimana niat perilaku bapak/ibu terhadap penggunaan SIKD di tempat bapak/ibu bekerja.

- Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang niat perilaku menggunakan SIKD di tempat bapak/ibu bekerja sesuai dengan kelompok pertanyaan di bawah ini.

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya selalu mencoba untuk menggunakan SIKD setiap kali saya melakukan tugas dan SIKD sangat membantu saya dalam melakukan itu.					
2	Saya selalu mencoba untuk menggunakan SIKD setiap ada kasus yang mungkin terjadi dalam pekerjaan saya.					
3	Saya berencana untuk menggunakan SIKD di masa yang akan datang.					
4	Saya berniat untuk terus menggunakan SIKD di masa yang akan datang.					
5	Saya berharap SIKD digunakan terus menerus di masa yang akan datang.					

e. Penggunaan SIKD Sesungguhnya (*Actual Use*)

Daftar pertanyaan berikut, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada bapak/ibu dalam mengungkapkan bagaimana penggunaan SIKD sesungguhnya dalam setiap aktivitas instansi tempat bapak/ibu bekerja.

- Seberapa berat intensitas penggunaan SIKD sesungguhnya yang dioperasikan oleh Bapak/Ibu dalam setiap mengelola kegiatan instansi tempat Bapak/Ibu bekerja. (Mohon bapak/ibu nyatakan sesuai dengan praktek selama ini).
- Seberapa sering Bapak/Ibu menggunakan SIKD dalam mengelola aktivitas instansi tempat bapak/ibu bekerja.

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Seberapa berat intensitas penggunaan anda terhadap sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dalam pekerjaan anda.					
2	Seberapa sering anda menggunakan SIKD.					

Tabel 4.3 Nama-nama Responden Kuesioner

No	Nama Responden	Jenis kelamin
1	Ifa Muliana	P
2	Irfan	L
3	Resky	P
4	Bahri	L
5	Irmawati arta	P
6	Indriani abubakar	P
7	Muhammad denial	L
8	Sugiono	L
9	Ruslan	L
10	A. Kristin saribanong	P
11	A. Amran	L
12	H.Amiruddin	L
13	Hasniati	P
14	A.Awaluddin	L
15	Verawati	P
16	H.A. Ambang	L
17	Arif	L
18	Irmawati hanif	P
19	Indah	P
20	Muflihah	P

21	Nurintan	P
22	Ratnawati	P
23	Iva yulianinngsi	P
24	Yuliana	P
25	Haslinda	P
26	Ridwan	L
27	Irwan	L
28	Bahar	L
29	Syukri	L
30	Saifullah	L
31	Ahmad amrullah	L
32	Sulkifli	L



DARMIATI, Lahir pada tanggal 05 Agustus 1993 di Kabupaten Sinjai. Anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Sanu dan Ibunda Nurhaya. Penulis memasuki jenjang pendidikan formal di SD NO 81 Katute Kecamatan Sinjai Borong pada tahun 1999 dan tamat pada tahun 2005. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dan tamat pada tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama (2011) penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi dengan menghasilkan karya ilmiah yang berjudul “ Analisis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Menggunakan *Technology Acceptance Model* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai” dan tamat pada tahun 2015.